

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu¹. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, *pertama* adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, *kedua* adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.²

Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Kurikulum adalah inti dari proses pendidikan, Karena diantara bidang-bidang pendidikan yaitu: manajemen pendidikan, manajemen kurikulum, dan manajemen layanan mahasiswa, kurikulum merupakan bidang yang paling berpengaruh terhadap jalannya pendidikan dan pada hasil pendidikan. Pada perkembangannya, pengembangan kurikulum minimal dapat dibedakan menjadi “disain kurikulum atau kurikulum tertulis (*design, ideal, writen, formal, dokumen, official, curriculum*) dan implementasi kurikulum (*curriculum implementation, actual curriculum, real curriculum*)”³.

Pengembangan kurikulum bukanlah suatu hal yang berhenti sebelum masuk ke dalam kelas dan kurikulum bukanlah paket yang berhenti berkembang di dalam kelas. Pengembangan Kurikulum merupakan proses konstruksi dan modifikasi yang

¹ Presiden RI, “20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional.” (8 Juli 2003).

² Presiden RI, “12 tahun 2012, Pendidikan Tinggi.” (10 Agustus 2012).

³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*. (Makalah dalam Lokakarya Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 2003). 1

berkelanjutan. Berbagai pihak berkontribusi dalam proses pengembangan kurikulum ini, termasuk pemerintah, orang tua, guru, peserta didik dan masih banyak lagi yang lainnya. Masing-masing memiliki peran tersendiri terhadap proses pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, untuk memahami prosesnya, kita tidak boleh membatasi studi kita pada struktur kurikulum atau isi kurikulum, tetapi harus menyadari peran kontributor yang berbeda.⁴

Desain kurikulum bersifat menyeluruh, yang mencakup semua rancangan dan komponen kurikulum seperti dasar-dasar dan struktur kurikulum, sebaran mata kuliah atau mata pelajaran perkuliahan, Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), program tahunan atau semester silabus, satuan pembelajaran, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS), rancangan pengembangan media, dan alat evaluasi, tetapi bisa juga berkenaan dengan salah satu bentuk desain atau rancangan.

Kurikulum memiliki pengertian yang cukup kompleks, dan sudah banyak didefinisikan oleh para pakar. Pada dasarnya, kurikulum membicarakan proses penyelenggaraan pendidikan sekolah, berupa acuan, rencana, norma-norma yang dapat dipakai sebagai pegangan. Secara umum struktur dalam kurikulum memiliki empat komponen utama didalamnya, yaitu sebagai berikut: tujuan, materi atau bahan (organisasi isi), proses belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum ditafsirkan sebagai materi pelajaran dalam arti sempit, sedangkan menurut pengertian yang luas, kurikulum dikatakan sebagai keseluruhan program lembaga pendidikan. Spektrum di antara kedua kutub itu menafsirkan

⁴ Lau, D. C. M. (2001). Analysing the curriculum development process: three models. *Pedagogy, Culture and Society*, 9 (1), 29-44. *Curriculum development is not an entity that stops before going into classrooms and curriculum is not a package that stops developing in the classrooms. It is a continuous process of constructing and modifying. Various parties contribute to this process, which include government, publishers, parents, teachers and learners. This list is endless. However, the effect each party exerts is different. Some are more powerful than others, meaning that they can influence the process at a greater extent or even control the behaviour of other parties. Therefore, to comprehend the process, we should not limit our study to the curriculum structure or curriculum contents, but should be aware of the roles of different contributors.*

kurikulum sebagai perencana interaksi antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan suatu pendidikan.

Pengertian kurikulum pada umumnya adalah merujuk pada perencanaan kegiatan belajar mengajar guna mencapai tujuan suatu instansi. Pengertian kurikulum yang berada pada spektrum ini antara lain dikemukakan oleh beberapa ahli⁵. Pada undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kurikulum diartikan sebagai Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu⁶. Hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam kurikulum yang telah dijalankan oleh instansi masing-masing.

Komponen kurikulum juga dapat dilihat berdasarkan siklus pengembangan kurikulum. Setiap perbuatan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, baik yang berkenaan dengan pembinaan pribadi, pembinaan kemampuan sosial, kemampuan untuk bekerja, ataupun untuk pembinaan perkembangan lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diperlukan isi/materi yang harus disampaikan kepada peserta didik melalui suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan tepat.⁷

1. Model Pengembangan Kurikulum

Ada beberapa model yang bisa digunakan dalam pengembangan kurikulum. Pemilihan model pengembangan kurikulum tidak hanya ditentukan atas kebaikan, kelebihanannya ataupun keoptimalan dalam hasil pencapaian tujuan, tetapi juga harus disesuaikan dengan sistem pendidikan, sistem pengelolaan serta model pendidikan yang akan digunakan. Model perancangan kurikulum yang dibahas menunjukkan bahwa perancangan kurikulum dilakukan secara bertahap. Beberapa model kurikulum menganggap proses lebih penting daripada tujuan. Model lain mengambil tujuan sebagai hal terpenting dari desain kurikulum. Umumnya, semua model

⁵ Finc, Curtis, R & Cruncilton. John R, *Curriculum Development in Vocational and Technichal Education: Planning, Content, and Implementation*. (Boston: Allyn & Bacon, Inc,1979), 45

⁶ Nurdin, Syafruddin, *Kurikulum & Pembelajaran*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016) 50.

⁷ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017), 80-81.

menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kurikulum.⁸

Sebagai contoh, Nana Syaodih mengatakan bahwa model pengembangan dalam kurikulum yang sifatnya subyek akademis berbeda dengan kurikulum humanistik, teknologis dan rekonstruksi sosial. Ada beberapa model pengembangan kurikulum yang bisa digunakan, diantaranya adalah⁹:

a. *The Administrative Model*

The Administrative Model adalah model pengembangan kurikulum yang inisiasi atau gagasannya berasal dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Model ini berkembang pada sistem pendidikan yang bersifat sentralisasi¹⁰.

b. *The Grass Roots Model*

The grass roots model adalah model pengembangan kurikulum yang inisiatif atau gagasannya berasal dari bawah yaitu dari guru-guru atau sekolah. Model ini akan berkembang dalam model sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi¹¹.

c. *Beuchamp's System*

Menurut Beuchamp's, ada lima hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

- 1) Menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum;
- 2) Menetapkan personalia;
- 3) Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum;
- 4) Implementasi kurikulum;

⁸ Chaudhary, G. K., & Kalia, R. (2015). Development curriculum and teaching models of curriculum design for teaching institutes. *International Journal of Physical Education, Sports and Health*, 1(4), 57-59. *The curriculum design models discussed show that curriculum designing is conducted stage by stage. Some of the models discussed consider the process to be more important than the objectives. Other models take objectives to be the most important feature of curriculum design. Generally, all models stress the importance of considering a variety of factors that influence curriculum.*

⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017), 161.

¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, 161-162

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017), 163-164.

5) Evaluasi Kurikulum.¹²

d. The Demonstration Model

Model demonstrasi pada dasarnya mirip dengan model grass roots. Inisiatif berasal dari sekelompok guru, atau sekelompok guru bekerjasama dengan ahli untuk mengembangkan sebuah kurikulum, disuatu sekolah atau beberapa sekolah. Menurut Smith, Stanley dan Shores, ada dua variasi model demonstrasi, yaitu :

- 1) Sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk mengadakan penelitian dan pengembangan tentang salah satu atau beberapa komponen kurikulum. Penelitian ini dipelopori oleh instansi pendidikan yang berwenang, seperti pusat pengembangan kurikulum, Dirjen Pendidikan atau yang lainnya.
- 2) Beberapa orang guru yang merasa kurang puas, mengadakan penelitian dan pengembangan sendiri.¹³

e. Taba's Inverted Model

Taba berpendapat bahwa pengembangan kurikulum yang bersifat induktif yang lebih bisa mendorong inovasi dan kreativitas guru. Menurut Taba, ada lima langkah dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

- 1) Mengadakan unit-unit percobaan bersama guru. Dalam kelas-kelas percobaan ini dipelajari dengan seksama tentang hubungan antara teori dan praktek. Percobaan yang dilakukan diharapkan mendapatkan data-data yang bisa untuk menguji landasan teori yang digunakan;
- 2) Menguji unit percobaan. Meskipun telah diuji dikelas percobaan, tetapi masih harus diuji dikelas-kelas lain atau tempat lain untuk mengetahui validitas, kepraktisannya serta untuk menghimpun data untuk penyempurnaan;
- 3) Mengadakan revisi dan konsolidasi, yaitu data yang diperoleh dalam kelas-kelas percobaan digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Tidak sebatas mengadakan perbaikan dan penyempurnaan juga

¹² Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, 163-164.

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, 165.

- diadakan konsolidasi pada daerah yang lebih luas, untuk penarikan kesimpulan tentang hal-hal yang bersifat umum;
- 4) Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum, yaitu jika dalam kegiatan penyempurnaan dan konsolidasi diperoleh sesuatu yang sifatnya lebih luas, maka perlu dikaji oleh para ahli kurikulum atau para professional kurikulum lainnya;
 - 5) Implementasi dan diseminasi, yaitu menerapkan kurikulum baru pada daerah atau sekolah-sekolah yang lebih luas.¹⁴

f. *Roger's Interpersonal Relations Model*

Menurut Roger, manusia berada dalam proses perubahan. Manusia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan, maka manusia memerlukan orang lain. Pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan perkembangannya. Ada 4 (empat) langkah pengembangan kurikulum model Roger, yaitu:

- 1) Pemilihan target dari sistem pendidikan;
- 2) Partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif;
- 3) Pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran;
- 4) Partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok¹⁵.

g. *The Systematic-Research Model*

Model pengembangan kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perkembangan sosial, artinya, dalam penyusunan kurikulum harus memasukkan pandangan dan harapan-harapan masyarakat. Ada dua prosedur dalam action research model, yaitu :

- 1) Mengadakan kajian secara seksama tentang masalah-masalah kurikulum dengan cara mengidentifikasi faktor- faktor, kekuatan dan kondisi yang mempengaruhi.

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, 166.

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, 167-168.

- 2) Implementasi dari keputusan yang diambil dengan mengumpulkan data-data dan fakta-fakta tersebut¹⁶.

h. *Emerging Technical Model*

Pengembangan kurikulum pada model ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis. Pengembangan kurikulum didasarkan pada beberapa model, di antaranya adalah :

1) *The Behavioral Analisis model*

The Behavioral model menekankan pada penguasaan perilaku atau kemampuan. Perilaku atau kemampuan disusun secara hirarkis, dari yang sederhana sampai yang komplek.

2) *The System Analisis Model*

Pada model ini ada empat langkah yang harus ditempuh, yaitu:

- (a) Menentukan spesifikasi perangkat hasil belajar yang harus dikuasai siswa;
- (b) Menyusun instrumen penilaian;
- (c) Mengidentifikasi tahap-tahap ketercapaian serta biaya yang diperlukan;
- (d) Membandingkan biaya dan keuntungan dengan program yang lainnya;

3) *The Computer Based Model*

Pada model ini pengembangan kurikulum dengan mengidentifikasi seluruh unit kurikulum, kemudian siswa dan guru diperintahkan untuk melengkapi pertanyaan tentang unit-unit kurikulum, kemudian setelah diolah disesuaikan dengan kemampuan dan hasil belajar yang dicapai, disimpan dalam komputer¹⁷.

Model kurikulum yang terbaik harus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa pada tingkat individu, juga harus mempertimbangkan lingkungan belajar yang tersedia, fasilitas dan waktu juga. Semua kebutuhan harus diidentifikasi pada tingkat pertama dan kemudian tujuan harus didefinisikan sesuai dengan pelajar, lingkungan, persyaratan materi pelajaran dan waktu juga. Selain itu, kurikulum juga harus menarik,

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, 169.

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, 170.

memotivasi, fleksibel, serta praktis sehingga dapat dengan mudah diimplementasikan.¹⁸

Dalam pengembangan kurikulum KKNI ditempatkan untuk menyamakan prestasi belajar yang diperoleh dari pendidikan informal, formal, atau nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan di luar ranah kementerian pendidikan nasional, hal ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal, bidang profesional, meningkatkan pengalaman individu.¹⁹

Berdasarkan teori di atas, STAI Al Anwar Sarang Rembang menerapkan model pembelajaran dengan *the Systematic-Research Model*, yaitu model pengembangan kurikulum ini didasarkan pada asumsi masyarakat, pengguna lulusan, alumni dan yang terpenting dengan mengadakan workshop penyusunan kurikulum, karena pada dasarnya pada penerapan kurikulum KKNI ini lebih menekankan pada pengamatan langsung dilapangan, dalam rangka mengembangkan bidang keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) dan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) Program Studi jenjang sarjana pada STAI Al Anwar Sarang Rembang.

Model pembelajaran dengan menggunakan kurikulum berbasis KKNI nantinya menuntut mahasiswa untuk memiliki kemampuan yang memenuhi kriteria seperti: a) Aspek Attitude, b) Kemampuan kerja, c) Pengetahuan dan d) Manajerial yang bertanggungjawab. Oleh karena itu STAI Al Anwar Sarang Rembang mempunyai target pencapaian dalam menjabarkan pembelajaran pada setiap mata kuliah yang ada sehingga tersusun sesuai kebutuhan profil kelulusan.

¹⁸ Bhuttah, T. M., Xiaoduan, C., Ullah, H., & Javed, S. (2019). Analysis of curriculum development stages from the perspective of Tyler, Taba and Wheeler. *European Journal of Social Sciences*, 58(1), 14-22. *The best curriculum model should be according to the needs of learner at individual or class level, it should also take into account the available study environment, facilities and time as well. All the needs should be identified at first level and later the objective should be defined according to learner, environment, subject matter requirements and time as well. Further, a curriculum should also be interesting, motivational, flexible as well as practical so that it can be easily implemented.*

¹⁹ Fatoni, A. (2015). Manajemen Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 5 (1), 76-91.

2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, adalah pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Implementasi kurikulum KKNI sebenarnya memperjelas hasil profil lulusan di setiap program studi dan prestasi yang diraihinya, lalu apa yang diperoleh setelah menjadi mahasiswa agar dalam menyusun kurikulum yang mampu berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang digagas oleh Prodi.²⁰

Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan setara dengan kemampuan (capaian pembelajaran) atau (*learning outcomes*) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI dan standar kompetensi guru yang ditetapkan. Selain itu secara konseptual dan empirik memerlukan penyesuaian tingkat kebijakan yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun berbagai program, termasuk pendidikan guru.

Kajian terhadap undang-undang dan peraturan berkaitan dengan guru menghasilkan berbagai rumusan yang intinya menunjukkan urgensi dan perlunya terobosan untuk menerjemahkan ketentuan tersebut secara arif ke dalam kebijakan dan program penyusunan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan (LPTK) untuk mendorong tercapainya visi pendidikan Indonesia tahun 2025.

Guru merupakan jabatan profesional yang memberikan layanan ahli dan menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik dan pedagogis maupun secara profesional dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan yang terkait, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak pembina guru dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah. Guru sebagai penyandang jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh sebab itu, diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para

²⁰ Hasanah, N. (2014). Kesiapan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Kurikulum Berbasis KKNI (Studi Kasus Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Ambon). *Jurnal Fikratuna*, 6(2).

lulusannya dengan berbagai kompetensi yaitu penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, maupun strategi menerapkannya secara professional di lapangan.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai institusi yang diberi mandat untuk menghasilkan pendidik professional untuk menyiapkan generasi masa depan yang unggul harus mampu menghasilkan lulusan yang unggul pula. Untuk mewujudkan profil lulusan guru yang profesional perlu dirancang sebuah kurikulum yang menjamin ketercapaian kompetensi lulusan sesuai Standar Nasional Dikti. LPTK menyusun rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Perguruan tinggi. LPTK Wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Perguruan tinggi diwajibkan menerapkan berbagai standar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan lainnya yang terkait dengan terlaksananya penjaminan mutu internal dan eksternal.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.²¹

KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah hingga kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi.²² Lulusan sarjana berada pada jenjang ke 6 pada KKNI, berdasarkan PP No 8 Tahun 2012 pasal 5 butir f yang berisikan bahwa lulusan

²¹ Presiden Republik Indonesia, “8 Tahun 2012, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,” (17 Januari 2012)

²² Administartor, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI/Indonesia Qualification Framework (IQF), 17 Januari, 2022. <http://penyelarasan.kemdiknas.go.Id/content/detail/ 201.html>

diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana paling rendah setara dengan jenjang enam²³.

Deskripsi umum jenjang kualifikasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

KKNI diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang merupakan penjabaran dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Dalam peraturan tersebut, pada Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, pengaturan tentang implementasi KKNI diatur lebih lanjut dalam:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

²³ Presiden Republik Indonesia, "8 Tahun 2012, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia," (17 Januari 2012)

- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan berbasis Kompetensi.
- 6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.²⁴

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, Pasal 10 ayat 4 dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang;
- b. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
- c. Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

KKNI mempunyai kajian historis yang legal formal mulai tahun 2003 hingga target implementasi selambat-lambatnya pada tahun 2016. Artinya KKNI telah dipersiapkan sejak lama, dalam rentang waktu sepanjang itu berbagai pihak telah menyelesaikan 7 pekerjaan besar yaitu:

²⁴ Megawati Santoso dkk, *Landasan Hukum KKNI*, (Jakarta. Kemenristek DIKTI, 2015), 2.

- a. Pada tahun 2003 hingga 2006 mengkaji berbagai literature di bidang perundang-undangan yang dapat menopang legalitas KKNI;
- b. Pada tahun 2009 melakukan studi komparasi kerangka kualifikasi dari berbagai Negara;
- c. Pada tahun 2010 menyusun draf KKNI;
- d. Pada tahun 2011 melakukan pengembangan KKNI;
- e. Implementasi KKNI melalui Perpres No. 8-tahun-2012;
- f. Merespon AFTA;
- g. Penyetaraan antara kualifikasi lulusan dengan kualifikasi KKNI.²⁵

Peraturan pemerintah yang menjadi dasar tumpuan KKNI adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Serifikasi Profesi. Kedua peraturan tersebut merupakan hasil kajian literatur perundang-undangan yang dilakuka oleh kementerian pendidikan dan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi sebagai awal pijakan penyusunan KKNI.

Setiap jenjang kualifikasi dalam KKN terdiri dari empat parameter utama yaitu:

- a. Keterampilan kerja;
- b. Cakupan keilmuan/pengetahuan;
- c. Metode dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/ pengetahuan;
- d. Kemampuan manajerial dan tanggungjawab.

Keempat parameter tersebut diatas kemudian dirumuskan dalam bentuk deskripsi yang kemudian dikenal dengan deskripsi generik. Berikut deskripsi generic yang dimaksud;

- a. Keterampilan kerja, yaitu kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotor, dan afektif yang tercermin dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan;
- b. Cakupan keilmuan/ pengetahuan, yaitu rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan kerumitan/ kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki;
- c. Metode dan tingkat kemampuan, yaitu cara memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metode yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk di dalamnya kemampuan berfikir;

²⁵ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Ofset, 2016), 16.

- d. Kemampuan manajerial, yaitu kemampuan dan sikap seseorang yang disyaratkan dalam melakukan dalam melakukan suatu tugas serta tingkat tanggung jawab dalam bidang kerja tersebut.²⁶

3. Tujuan Kurikulum KKNi

Tujuan penyusunan kurikulum ini adalah sebagai berikut:

- a. Menghasilkan kurikulum Program Studi yang akuntabel mengacu KKNi dan SNPT;
- b. Menghasilkan lulusan Program Studi yang memiliki kualifikasi level KKNi dan standar kompetensi guru yang ditetapkan;
- c. Membekali lulusan Program Studi yang memiliki kompetensi penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, dan strategi menerapkannya secara profesional di lapangan.²⁷

4. Indikator Ketercapaian

Indikator ketercapaian kegiatan penyusunan kurikulum Program Studi adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) lulusan dari program studi, yang mengacu pada deskripsi KKNi (Perpres No.8/2012) dan memenuhi standar pendidikan guru;
- b. Uraian kaitan antara capaian pembelajaran dengan penerapan pada (kerangka) kurikulum yang direncanakan. Dokumen kurikulum ini terdiri dari penetapan profil lulusan, kompetensi lulusan, elemen kompetensi, matriks kompetensi dan bahan kajian, penetapan sks, dan struktur kurikulum;
- c. Rencana pembelajaran yang merupakan strategi pencapaian pembelajaran untuk mata kuliah yang menjadi penciri program studi. Rencana Pembelajaran ini antara lain berisi tujuan mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, metode pembelajaran dan penilaian hasil belajarnya;
- d. Kurikulum yang menjamin pengembangan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) yang tersirat di dalam contoh Rencana Pembelajaran

²⁶ Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi*.

²⁷ Megawati Santoso dkk, *Landasan Hukum KKNi*, (Jakarta. Kemenristek DIKTI, 2015), 3.

Semester (RPS) dan Rencana Pembelajaran Mingguan (RPM);

- e. Implementasi standar-standar pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

5. Penyusunan Kurikulum

Rencana kegiatan penyusunan kurikulum yang mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SNPT secara umum akan menganalisis perkembangan keilmuan dan keahlian kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan untuk merumuskan profil lulusan yang kemudian digunakan sebagai pembahasan rumusan Capaian Pembelajaran. Deskripsi Capaian Pembelajaran digunakan sebagai acuan membahas pemilihan bahan kajian (keluasan, kedalaman, dan tingkat penguasaan serta Matriks antara bahan kajian/ pengetahuan dengan sikap, dan keterampilan. Lingam menyatakan bahwa *Therefore, it is imperative to put in place a curriculum which would help develop relevant skills for participation in a globalizing world and at the same time help in social and cultural development domestically.*²⁸

KKNI merupakan wujud dari keunggulan bangsa Indonesia mengenai fungsi pendidikan nasional, fungsi kinerja pelatihan kerja nasional dan penilaian pemerataan nasional, yang hampir seluruhnya dimiliki oleh Indonesia dalam memberikan hasil sumber daya manusia dalam pembelajaran. Prestasi yang akan dimiliki oleh setiap tenaga kerja Indonesia sehingga tercipta hasil suatu karya dalam memberikan kontribusi yang sangat bermutu di bidangnya masing-masing.²⁹

Kurikulum KKNI penting untuk diimplementasikan, jika dilihat dari standar kompetensi mahasiswa dan program studi. Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menyusun kurikulum perguruan tinggi, lembaga akan merasakan kemungkinan adanya perbedaan hasil yang diperoleh karena sudah ada peraturan prestasi belajar

²⁸ Lingam, Govinda Ishwar, Greg Burnett, Jullian Fenny Lilo, Narsamma Lingam (2014). *Curriculum Reform in Solomon Islands: A Shift from Eurocentrism to Solcentrism in Curriculum Making*. Asia-Pacific Edu Res (2014) 23(3):345–353 DOI 10.1007/s40299-013-0109-6

²⁹ Maba, W. (2016). Kurikulum Sarjana Berbasis Kkni Mengubah Mintset Pengajaran Menjadi Pembelajaran. *Jurnal Bakti Saraswati*, 5(1), 75543.

nasional.³⁰ Selanjutnya, pemilihan bahan kajian dan matriks digunakan untuk merumuskan konsep mata kuliah dan besarnya sks. Konsep mata kuliah dan besaran sks digunakan sebagai acuan untuk merumuskan struktur kurikulum dan rancangan pembelajaran. Keseluruhan proses ini akan menghasilkan dokumen kurikulum baru program studi.

Adapun tahapan-tahapan kegiatan penyusunan kurikulum yang mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SNPT antara lain sebagai berikut:

a. Penetapan Profil Lulusan

Penetapan profil lulusan merupakan rumusan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi berdasarkan bidang keahlian atau kesesuaiannya dengan bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha serta industri, juga kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Profil tersebut disusun bersama oleh program studi sejenis sehingga disepakati sebagai rumusan profil yang berlaku secara nasional. Dalam rumusan profil tersebut termuat peran-peran yang memerlukan kemampuan yang harus dimiliki.

Profil lulusan menjadi pembeda suatu program studi dengan program studi lainnya. Profil lulusan dinyatakan dengan kata benda yang menunjukkan peran dan fungsi lulusan setelah lulus dari suatu program studi, bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan. Namun demikian, dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jabatan, penentuan profil lulusan dapat dilakukan dengan mudah. Program studi dapat menambahkan profil lulusan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya, misalnya ilmuwan Muslim dan problem solver, dan sebagainya.

Profil tersebut tidak boleh keluar dari bidang keilmuan/keahlian program studi. Contoh: Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir tidak boleh memiliki profil lulusan sebagai guru PGMI walaupun dalam kenyataan lulusan Program Studi tersebut ada yang menjadi guru.

³⁰ Juhji, J. (2019). Analyzing madrasah ibtidaiyah teacher candidates skill of technological pedagogical content knowledge on natural science learning. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 6(1), 1-18.

Penyusunan Profil Lulusan dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

- 1) Melakukan studi pelacakan (*tracer study*) kepada pengguna potensial yang sesuai dengan bidang studi, salah satunya dengan mengajukan pertanyaan berikut: berperan sebagai apa sajakah lulusan program studi tertentu? Jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan “sinyal kebutuhan pasar” atau *market signal*.
- 2) Mengidentifikasi pengguna lulusan hal ini berdasarkan tujuan diselenggarakannya program studi sesuai dengan visi dan misi.
- 3) Membuat kesepakatan antar program studi yang sama sehingga ada penciri umum program studi.

Tahapan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan dan merujuk pada SNPT yang berkaitan dengan rumusan sikap dan keterampilan umum. Rumusan dalam KKNI dan SNPT merupakan standar minimal.

Program studi dapat menambahkan rumusan kemampuan untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Deskripsi CP yang ditetapkan oleh gabungan program studi dapat diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan ditetapkan sebagai rujukan Program Studi sejenis. Deskripsi tersebut sebagai kriteria minimal capaian pembelajaran lulusan pada PTKI.³¹

b. Bahan Kajian

Langkah selanjutnya setelah penetapan CP adalah penentuan bahan kajian. Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan bahan kajian di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Rumusan bahan kajian dapat dianalisis pada awalnya berdasarkan unsur pengetahuan dari CPL yang telah dirumuskan. Unsur pengetahuan ini seyogyanya menggambarkan batas dan lingkup bidang

³¹ Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Tahun 2018

keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan Program Studi.

- 2) Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum Program Studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu Program Studi tersebut.
- 3) Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni program studi.
- 4) Program studi dengan melibatkan dosen dapat mengurai bahan kajian tersebut menjadi lebih rinci pada tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam SNPT pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015.
- 5) Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Misalnya dalam bahan kajian tentang “karakteristik peserta didik” terdapat 10 sub pokok bahasan, maka keluasan bahan kajian tersebut dapat ditetapkan sebesar 10.
- 6) Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan. Hal ini dapat didasarkan pada gradasi pengetahuan menurut Taksonomi Bloom, yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan = 3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6. Misalnya untuk kemampuan memahami materi “karakteristik peserta didik” kedalamannya adalah 2.

c. Menyusun Mata Kuliah

Setelah bahan kajian ditentukan bobot keluasan dan kedalamannya pada setiap CP yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah penyusunan mata kuliah. Dalam menentukan mata kuliah, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain:

- 1) Pola penentuan mata kuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut;
- 2) Nama mata kuliah disesuaikan kelazimannya dalam program studi sejenis. Hal tersebut didasarkan atas kesamaan rumusan CPL pada program studi.

Penentuan besaran SKS Mata Kuliah dapat dilakukan dengan cara membagi beban mata kuliah dengan beban total mata kuliah untuk seluruh CP dikalikan dengan minimum jumlah SKS setiap jenjang (misalnya sarjana, magister, dan doktor).

Setiap program studi untuk mewadahi profil dan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai penciri kompetensi, dapat memasukkan mata kuliah penciri CPL tersebut. Adapun mata kuliah wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang harus dimasukkan oleh setiap program studi yaitu: 1) Agama, 2) *Pancasila*; 3) *Kewarganegaraan*; dan 4) *Bahasa Indonesia*. Terkait dengan penentuan jumlah SKS secara keseluruhan, program studi dapat mempertimbangkan masa studi tercepat yang akan digunakan, misalnya 8 semester. Maka jumlah maksimum SKS keseluruhan dapat dihitung menjadi: $16,9 \text{ SKS/smt} \times 8 \text{ smt} = 135,5 \text{ SKS}$ ditambah SKS layanan bimbingan skripsi 6 SKS dan KKN 4 SKS menjadi 145,5 SKS atau $19,06 \text{ SKS/smt} \times 8 \text{ smt} = 152,5 \text{ SKS}$. Jika program studi menetapkan 145 SKS yang akan ditempuh selama 8 semester, maka perhitungan SKS mata kuliah seperti tertera pada tabel 10 dengan formula: beban MK dibagi total beban mata kuliah dikalikan total SKS yang harus ditempuh (145).

Mata kuliah disusun dan diberikan kode serta beban SKS. Penyusunan struktur mata kuliah sesuai dengan urutan keterkaitan bahan kajian pada CP. Adapun penentuan kode mata kuliah dapat dilakukan dengan menyusun berdasarkan kriteria tertentu.

d. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen atau tim dosen. Rencana Pembelajaran

Semester (RPS) ini merupakan kegiatan atau tindakan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model dan teknik) serta cara menilainya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar mengajar selama satu semester menjadi efektif dan efisien.

Komponen RPS berdasarkan SNPT terdiri dari : a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.

Pembelajaran memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sebagai berikut:

- 1) Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 2) Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional.
- 3) Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 4) Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- 5) Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 6) Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 7) Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 8) Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 9) Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

e. Penilaian

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian tersebut mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrument penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.

6. Pesantren

a. Pengertian Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia merupakan wadah tempat berlangsungnya pembelajaran khusus tentang kajian keislaman, yang memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, pesantren menjadi satuan pendidikan bukan hanya sebatas tempat menginap santri. Namun keberadaan pesantren sebagai suatu tatanan sistem yang mempunyai

unsur yang saling berkaitan. Pesantren sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan yang jelas yang melibatkan banyak sumber daya pendidikan guna mencapai tujuan, baik yang bersifat individu ataupun tujuan kelembagaan. Dalam upaya mencapai tujuan itu, berlaku ketentuan yang mengatur hubungan unsur yang satu dengan yang lainnya. Karena itu, pesantren sebagai sebuah satuan pendidikan yang mengkaji disiplin ilmu agama sekaligus sebagai organisasi pembelajaran, yang membutuhkan pengelolaan sumber daya pendidikan termasuk sumber daya belajar.³²

Lembaga pondok pesantren memainkan peranan penting dalam usaha memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia, terutama pendidikan agama. Dari awal mula adanya pesantren hingga saat ini masih terus dapat eksis dan berkembang dalam upaya memberikan pendidikan yang bermutu oleh karenanya diarahkan untuk melihat dengan jelas perkembangan yang terjadi pada dunia pesantren dari awal mula kemunculannya hingga saat ini, juga berbagai dinamika yang terjadi mengiringi eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengayoman masyarakat.

Dalam definisi lain pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang telah tua sekali usianya, telah tumbuh sejak ratusan tahun yang lalu, yang setidaknya memiliki lima unsur pokok, yaitu kyai, santri, pondok, masjid dan pengajaran dan ilmu-ilmu agama. Berdirinya pesantren juga diprakarsai oleh walisongo oleh Syeh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Gujarat India. Para Wali Songo tidak begitu kesulitan untuk mendirikan Pesantren karena sudah ada sebelumnya Institusi Pendidikan Hindu-Budha dengan sistem biara dan Asrama sebagai tempat belajar mengajar bagi para bikshu dan pendeta di Indonesia. Pada masa Islam perkembangan Islam, biara dan asrama tersebut tidak berubah bentuk akan tetapi isinya berubah dari ajaran Hindu dan Budha diganti dengan ajaran Islam, yang kemudian dijadikan dasar peletak berdirinya pesantren.³³

³² Majalah online Nasional Indonesia, *Membangun Perpustakaan Digital pada institusi pesantren*, Visi Pustaka Edisi: Vol.14 No.2-Agustus 2012.

³³ Majalah online Nasional Indonesia, *Membangun Perpustakaan Digital pada institusi pesantren*, Vol.14 No.2-Agustus 2012.

b. Bentuk-bentuk Pesantren

Dalam penyelenggaraan sistem pengajaran dan pembinaannya Pondok Pesantren dewasa ini digolongkan kepada tiga bentuk:³⁴

1) Pondok Pesantren Tradisional

Pondok pesantren tradisional adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non klasikal (sorogan) dimana seorang Kyai mengajar santri berdasarkan kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama besar sejak abad pertengahan sedangkan santri biasanya tinggal didalam pondok atau asrama dalam pesantren. Pesantren model ini masih memegang teguh penyampaian dengan pola tradisional dalam mengajarkan nilai-nilai Islam, ilmu yang dipelajaripun sama disemua pesantren model ini yakni kitab yang dikaji dan perbedaannya pada Kyai pada tiap pesantren.

2) Pondok Pesantren Tradisional Modern

Pesantren Model ini adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang menggabungkan sistem madrasah (klasikal) yang mengarah kepada sistem atau pola modern dari segi pengajaran dan penyampaian. Ciri model ini adalah peran seorang Kyai tidak mutlak lagi, akan tetapi ada pembagian tugas diantara pengasuh dan pembina. Sistem pengajarannya disamping menggunakan cara tradisional (sistem sorogan, bandongan, wetonan) juga memakai sistem modern (pembagian kelas) dengan menggunakan tingkat kemampuan santri. Pesantren ini juga mengadakan pendidikan formal untuk memberikan keseimbangan antara tuntunan duniawi dan ukhrowi.³⁵

3) Pondok Pesantren Modern

Pesantren Modern adalah Pesantren yang menggunakan sistem baru dari segi dan pengajarannya. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- a) Memakai cara diskusi dan tanya jawab dalam setiap penyampaian materi.

³⁴ Sudjoko Prasadjo. *Profil Pesantren*: Jakarta, 1982, 90.

³⁵ Abd Rahman al-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam, diterjemahkan Dahlan & Sulaiman*, (Bandung; Diponegoro, 1992)

- b) Adanya pendidikan kemasyarakatan, segenap pelajar memperhatikan dan mengerjakan hal-hal yang nantinya akan dialami oleh mereka dalam masyarakat ketika mereka berbaur dengan masyarakat.
- c) Adanya organisasi pelajar yang mengatur aktivitas mereka, segala sesuatu mengenai kehidupan mereka diatur dan diselenggarakan oleh mereka sendiri dengan cara demokrasi, gotong royong, dan dalam suasana ukhuwah yang dalam kontrol bimbingan dan pengawasan pengasuh atau pembinanya. Peranan dan fungsi pondok pesantren di atas terus berkembang dari masa ke masa. Sebagai lembaga pendidikan pondok pesantren menyelenggarakan pendidikan keagamaan, padat perkembangan selanjutnya pesantren membuka lembaga pendidikan formal, baik yang berafiliasi dengan pendidikan agama maupun dengan pendidikan umum atau sekuler.³⁶

c. Pendidikan Pesantren

Pesantren memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan masyarakat, kualitasnya harus terus didorong dan dikembangkan. Proses pembangunan manusia yang dilakukan pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan manusia yang tengah diupayakan pemerintah. Proses pengembangan dunia pesantren yang selain menjadi tanggung jawab internal pesantren, juga harus didukung oleh perhatian yang serius dari proses pembangunan pemerintah.

Meningkatkan dan mengembangkan peran serta pesantren dalam proses pembangunan merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Terlebih, dalam kondisi yang tengah mengalami krisis (degradasi) moral. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral, harus menjadi pelopor sekaligus inspirator

³⁶ Abd Rahman al-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam, diterjemahkan Dahlan & Sulaiman.*

pembangkit moral bangsa. Sehingga, pembangunan tidak menjadi hampa melainkan lebih bernilai dan bermakna.³⁷

Pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Karena sifat mandiriya itu, pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Karena itu, pesantren tidak mudah disusupi oleh ajaranajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan pondok pesantren yang merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional memiliki 3 unsur utama yaitu:

- 1) Kyai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri;
- 2) Kurikulum pondok pesantren; dan
- 3) Sarana peribadatan dan pendidikan, seperti masjid, rumah kyai, dan pondok, serta sebagian madrasah dan bengkel-bengkel kerja keterampilan.

Kegiatannya terangkum dalam "Tri Dharma Pondok pesantren" yaitu:

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
 - 2) Pengembangan keilmuan yang bermanfaat; dan
 - 3) Pengabdian kepada agama, masyarakat, dan negara.
- Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren sebenarnya memiliki tempat yang istimewa. Namun, kenyataan ini belum disadari oleh mayoritas masyarakat Muslim. Karena kelahiran Undang-Undang ini masih amat belia dan belum sebanding dengan usia perkembangan pesantren di Indonesia.³⁸

Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat kita lihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-undang Sisdiknas sebagai berikut: Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

³⁷ Abd Rahman al-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, diterjemahkan Dahlan & Sulaiman,

³⁸ Abd Rahman al-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, diterjemahkan Dahlan & Sulaiman

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁹

Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di pesantren. Pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang akan peneliti teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang telah dilakukan oleh Syafruddin Nurdin pada tahun 2017 yang berjudul “Pengembangan Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNI di Perguruan Tinggi”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengembangan kurikulum dan rencana pembelajaran semester berbasis KKNI. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan *library research*. Hasilnya adalah pengembangan kurikulum berbasis KKNI mengikuti langkah dan proses sebagai berikut; (1) merumuskan profil lulusan; (2) menetapkan dan menentukan capaian pembelajaran; yang memuat empat unsur, yaitu: (a) sikap dan tata nilai, (b) kemampuan kerja, (c) penguasaan pengetahuan, (d) wewenang dan tanggung jawab; (3) memilih dan menetapkan bahan kajian; (4) menetapkan mata kuliah yang akan diajarkan. Selanjutnya, diteruskan dengan menyusun Struktur Program Kurikulum, yang memuat kelompok mata kuliah, nama mata kuliah, sebaran mata kuliah, bobot masing-masing mata kuliah, dan lain-lain. Kemudian, baru ditentukan dosen atau staf pengajar yang akan mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahliannya.

³⁹ Abd Rahman al-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam, diterjemahkan Dahlan & Sulaiman*

Sebagai jabaran dan pengembangan dari kurikulum (*written curriculum*), disusun dan dikembangkanlah Silabus, yang memuat komponen-komponen, sebagai berikut; identitas silabus, sinopsis mata kuliah, capaian pembelajaran, indikator capaian pembelajaran, topik/sub topik, dan referensi.

Kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik dalam pembelajaran atau perkuliahan di kelas, maka silabus perlu dijabarkan/ dikembangkan menjadi Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat komponen; identitas RPS, capaian pembelajaran, indikator/capaian pembelajaran, metode pembelajaran, waktu, pengalaman belajar, kriteria dan bobot penilaian, dan daftar referensi.

Kedua, Penelitian yang telah dilakukan oleh Abdu Mas'ud, Pada Tahun 2014. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Biologi Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) Berbasis KKNI di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Khairun. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) memberikan informasi yang akurat kepada civitas akademik di Prodi Pendidikan Biologi FKIP untuk dapat mengimplementasikan rambu-rambu KPT berbasis KKNI; (2) memberikan model pengembangan perangkat pembelajaran Biologi KPT berbasis KKNI di Prodi Pendidikan Biologi, (3) memberikan acuan bagi Universitas Khairun dalam penentuan kebijakan berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan bidang akademik melalui implementasi KPT berbasis KKNI.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan menghasilkan output suatu desain perangkat pembelajaran berbasis KKNI di perguruan tinggi khususnya di Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Khairun. Desain yang dikembangkan adalah perangkat pembelajaran KPT berbasis KKNI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Produk desain perangkat pembelajaran Biologi Umum KPT berbasis KKNI telah diujicobakan di kelas IA angkatan 2013 dan divalidasi dengan kategori cukup layak KKNI digunakan sebagai perangkat pembelajaran kelas

Bilingual program PGMIPABI/PGMIPAU. 2) Produk perangkat pembelajaran yang dikembangkan masih perlu diperbaiki atau perlu dilakukan revisi untuk penyempurnaan hasil.

Ketiga

Adalah penelitian yang dilakukan oleh Deny setiawan, pada tahun 2017. Pengembangan Model Kurikulum Berorientasi KKNI di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kurikulum berorientasi KKNI di FIS UNIMED. Subjek penelitian ini yaitu: Validator ahli sebanyak 5 yang terdiri dari: (1) ahli desain kurikulum; (2) ahli IPS; (3) ahli Geografi; (4) ahli PKn; dan (5) ahli Antropologi. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan (R&D). Prosedur pengembangan yang akan ditempuh untuk menghasilkan produk model kurikulum berorientasi KKNI di FIS UNIMED dibagi menjadi empat tahapan, yaitu: (1) analisis pendahuluan, (2) pengembangan produk, (3) validasi produk, dan (4) uji kelayakan produk. Data dikumpulkan melalui angket validasi ahli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum berorientasi KKNI yang dikembangkan pada penelitian ini sangat layak diterapkan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Hal tersebut dikarenakan Kurikulum berorientasi KKNI yang dikembangkan telah memenuhi standar nasional dan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan perangkat perkuliahan berupa Rencana Perkuliahan Semester⁴⁰.

Keempat

Adalah penelitian yang dilakukan oleh Imroatus Solikhah, pada tahun 2016 yang berjudul Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Bahasa Inggris Berbasis KKNI. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah pengembangan model kurikulum Pendidikan Bahasa Inggris dalam konteks Kerangka

⁴⁰ Deny setiawan, *Pengembangan Model Kurikulum Berorientasi KKNI di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, (Tesis. Universitas Negeri Medan, 2017), Abstrak.

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang secara praktis disebut Kurikulum Bahasa Inggris Berbasis KKNI. Penelitian ini menggunakan design analisis isi berpijak pada evaluasi kurikulum berdasarkan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari dokumen, wawancara, diskusi dan workshop kemudian dari hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyepadanan terminologi dalam KBK dan KKNI diperlukan untuk kerangka kurikulum, learning outcomes lembaga dan learning outcomes mata kuliah harus lebih dulu dirumuskan sebelum penyusunan daftar mata kuliah dan distribusinya. Selanjutnya, jumlah kredit seluruh program and kredit per semester ditentukan. Kurikulum hasil pengembangan ini sudah mempertimbangkan jaminan kualitas dan bisa diadopsi untuk kegunaan Prodi.

Kelima Adalah penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin dan Laili Etika Rahmawati pada tahun 2016 yang berjudul “*SNPT and KKNI - Based Curriculum Organization*”. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Kurikulum dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada KKNI dan SN Dikti untuk setiap program studi yang mencakup sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Oleh karenanya, program studi (jenjang sarjana/ strata 1) LPTK perlu menyusun kurikulum dengan mengacu pada Perpres dan Permendikbud tersebut.

Penyusunan dimaksudkan agar program studi dapat menghasilkan kurikulum yang akuntabel dan lulusan yang memiliki kualifikasi level KKNI, SNPT dan standar kompetensi guru yang ditetapkan serta

membekali lulusan yang memiliki kompetensi penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, dan strategi menerapkannya secara profesional di lapangan.

Adapun tahapan-tahapan penyusunan kurikulum tersebut meliputi 1) menetapkan profil lulusan dan capaian pembelajaran (CP), 2) memilih dan merangkai bahan kajian, 3) and menyusun mata kuliah, struktur kurikulum, dan menentukan SKS, dan 4) menyusun rencana pembelajaran (RPS dan RPM).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah ada perbedaan penelitian yang akan peneliti adalah peneliti fokus pada model pengembangan kurikulum KKNi berbasis KKNi dan implementasinya yang ada di kampus STAI Al-Anwar Sarang Rembang pada program studi yang ada di Kampus tersebut, yaitu Program Studi Ilmu Al-Qur`an Tafsir (IQT) dan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah (PGMI).

C. Kerangka Berpikir

Dalam pendidikan tinggi, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberlangsungan dan pencapaian kualitas pendidikan, dengan bekal ilmu pengetahuan tanpa keterampilan akan menurunkan daya saing para lulusan. Dengan demikian para civitas akademika harus memahami pentingnya faktor keterampilan yang harus dimiliki baik oleh dosen maupun mahasiswa.

Tugas tenaga pendidik pada perguruan tinggi atau biasa disebut dengan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen merupakan ujung tombak dalam implementasi KKNi sebagai pihak yang melakukan proses penterjemah kurikulum sebagai rencana dan mengembangkan didalam kelas dalam bentuk kegiatan pembelajaran.

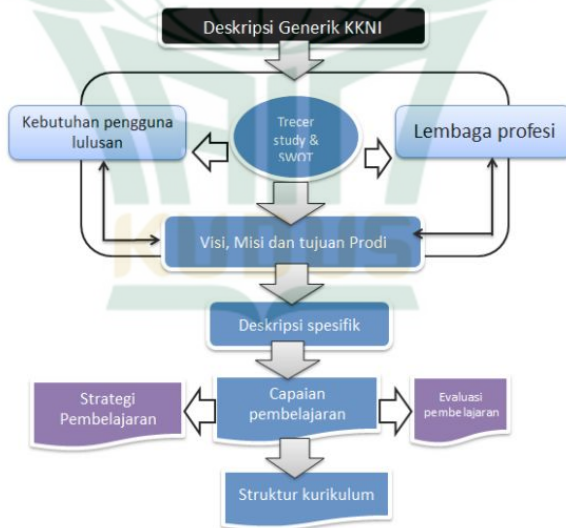
Dosen harus dapat mendidik dengan baik untuk dapat membantu perkembangan kemampuan setiap mahasiswa. Dosen perlu memperhatikan setiap mahasiswa agar memahami karakter belajar dan mudah dimengerti apa yang disampaikan. Dosen juga perlu menyampaikan materi yang sesuai dengan kurikulum serta

membimbing, memperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan serta menjawabnya dengan tepat, jelas dan benar.

Dengan demikian kurikulum perguruan tinggi harus disesuaikan dengan apa yang disebut sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara pandang orang terhadap kompetensi dosen dan mahasiswa yang tidak lagi melihat ijazah yang diperoleh, namun juga melihat pada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas baik formal maupun nonformal atau informal.

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. Implementasi KKNI berupa penyandingan dan penyetaraan antara bidang pendidikan, bidang pelatihan kerja dan pengalaman kerja adalah proses menyandingkan dan menyetarakan capaian pembelajaran antara pendidikan dengan pelatihan kerja dan/atau dengan pengalaman kerja.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bisa tergambar melalui bagan atau skema dalam bagan berikut dibawah ini:



Gambar 2.1
Alur Berpikir

Alur berpikir pada bagan diatas menunjukkan bahwasanya peneliti akan menelisik model pengembangan kurikulum berbasis KKNI yang ada di kampus STAI Al-Anwar Sarang khususnya pada kedua Prodi yang ada di STAI Al-Anwar Sarang. Dengan melakukan kajian mendalam terkait dengan model pengembangan kurikulum yang ada di Kampus tersebut diharapkan akan diperoleh hasil terkait dengan model pengembangan kurikulum berbasis KKNI yang sudah berjalan pada Program Studi Ilmu Al-Qur`an Tafsir (IQT) dan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) kampus STAI Al-Anwar Sarang Rembang.

